

BAB III

TATA KELOLA NEGARA SUDAN SELATTAN PASCA

MERDEKA

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang tata kelola negara Sudan Selatan. Sebagai negara republik, Sudan Selatan memiliki pandangan politik yang sesuai dengan prinsip-prinsipnya. *Platform* politik yang diadopsinya dari Sudan menjadi bekal dalam memperbaiki tata kelola negaranya. Partai politik yang dominan juga ikut berperan dalam berbagai isu politik dan pengambilan kebijakan.

Sebagai negara yang berdaulat, Sudan Selatan juga memiliki kebijakan luar negeri yang cukup ekstrim. Hal ini diterapkan dengan alasan agar negara ini mendapat pengakuan dan mampu menjalin kerjasama di dunia internasional. Sebagai pemula, Sudan Selatan sudah mampu dan cukup baik dalam menjalin hubungan kerja sama dengan negara lain.

A. Platform Politik Sudan Selatan

Pada saat proses kemerdekaan, Sudan Selatan masih terpengaruh oleh sosialisme yang sebelumnya pernah dipromosikan oleh John Garang ketika masih bergabung dengan Sudan. Garang memiliki keyakinan bahwa dengan menerapkan sosialisme semua masalah yang dihadapi Sudan Selatan pasca konflik seperti pembangunan nasional akan dapat terselesaikan dengan baik. Kendati demikian, Sudan Selatan tidak bisa dikatakan sepenuhnya menerapkan ideologi sosialisme, karena pada dasarnya negara ini juga membangun hubungan dengan negara-negara sayap kanan atau liberalisme seperti Amerika Serikat yang merupakan partner terbesar Sudan Selatan dari dulu hingga saat ini. Pasca kematian John Garang, SPLA menunjuk Salva Kiir Mayardit untuk menggantikan menjadi pemimpinnya. Sebelumnya, Salva Kiir

adalah wakil dari John Garang dalam memimpin SPLA, di mana mereka memainkan peran besar dalam perundingan perdamaian untuk mengakhiri perang sipil antara Sudan Utara dan Selatan. Pada referendum kemerdekaan, Salva Kiir menjadi presiden pertama Sudan Selatan. Selain mempertahankan perdamaian, salah satu pencapaian utama Salva Kiir yaitu berhasil melakukan integrasi pasukan militer yang berjumlah sekitar 40.000 orang (Al Jazeera, 2010).

Seperti negara pada umumnya, Sudan Selatan juga memiliki konstitusi sebagai landasan hukum dalam menjalankan kebijakan negaranya. Peraturan-peraturan mengenai Sudan Selatan pertama kali diatur dalam *Comprehensive Peace Agreement (CPA)* tahun 2005 yang memuat tentang pembagian daerah otonomi khusus Sudan Selatan. kemudian pada tahun yang sama di bentuk dan disahkan konstitusi sementara yaitu *The Interim Constitution of Southern Sudan (2005)* yang mengatur tentang tata kelola wilayah Sudan Selatan. Dalam pembukaan *The Interim Constitution of Southern Sudan (2005)* alenia 3 dan 6 tertulis bahwa:

“... Committed to the Comprehensive Peace Agreement of January 9, 2005 and The Interim National Constitution of the Republic of the Sudan, 2005;... Further committed to establishing a decentralized democratic multy-party sistem of governance in wich power shall be peacefully transferred and to upholding values of human dignity and equal rights and duties of men and women;”

Menurut pembukaan tersebut, Sudan Selatan akan berkomitmen dan berpegang teguh pada perjanjian CPA tahun 2005 dan Konstitusi Sementara Republik Sudan 2005 dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis, multi-partai, dan tersentralisasi. Di mana setiap kekuasaan harus di transfer secara damai dan menyeluruh untuk menjunjung tinggi nilai-nilai martabat manusia dan persamaan hak dan

kewajiban antara laki-laki dan perempuan (World Intellectual Property Organization, 2005). Di dalam *The Interim Constitution of Southern Sudan* (2005) lebih lanjut diatur juga mengenai semua tata kelola negara yang harus dijalankan Sudan Selatan sebagai negara baru sesuai dengan konstitusi yang ada. Menjelang kemerdekaan Sudan Selatan, yaitu pada tahun 2011 *The Interim Constitution of Southern Sudan* (2005) berubah menjadi konstitusi transisi yaitu *The Transitional Constitution of the Republic of South Sudan* (2011) untuk persiapan referendum pemisahan diri Sudan Selatan.

Saat ini, Sudan Selatan berada di tangan Salva Kiir merupakan negara republik yang menganut prinsip-prinsip yang lebih terbuka dalam melakukan pembangunan di negaranya. Salva Kiir juga berhasil membentuk sebuah komunitas yang disebut sebagai ‘Dialog Nasional’. Bagi Salva Kiir, dengan adanya Dialog Nasional maka negara akan lebih fleksibel dan terbuka dalam menampung aspirasi dari masyarakat. Hal tersebut dilontarkan Salva Kiir melalui pidatonya:

“The current situation in our country calls for a national dialogue, it calls for unity and an end to the cycle of violence and atrocities... The process of national dialogue must be seen as credible, genuine, and open to all the people of South Sudan”

Baik Presiden Salva Kiir maupun pemerintah Sudan Selatan sendiri memiliki peran langsung terhadap Dialog Nasional. Salva Kiir sendiri meresmikan Dialog Nasional pada Desember 2016 lalu, dan meminta pemerintah serta masyarakat Sudan Selatan untuk mendukung hal ini demi kemajuan negaranya. Meskipun sempat di kritik dalam melaksanakan Dialog Nasional karena alasan politik untuk melayani diri sendiri, Salva Kiir berupaya untuk menanamkan prinsip-prinsip utama inklusivitas dan transparansi. Presiden Salva Kiir juga melibatkan kelompok non-Dinka (Dinka merupakan komunitas etnis dominan Sudan Selatan), serta

kelompok-kelompok kecil lainnya termasuk perempuan, minoritas muslin, dan kelompok buruh. Tujuan dari Dialog Nasional sendiri adalah untuk mencapai tujuan daripada perdamaian, pemilihan umum yang bebas dan adil, serta serta tercapainya pembangunan ekonomi (South Sudan National Dialogue, 2018).

B. Partai Politik Sudan Selatan

Sudan Selatan memiliki kurang lebih tujuh (7) partai politik antara lain *Sudan People Liberation Movement* (SPLM), *National Congress Party* (NCP), *Southern Sudan Defense Force* (SSDF), *Sudan African National Union* (SUNA), *United Democratic Front* (UDF), *Union of Sudan African Parties* (USAP), dan *United Democratic Sudan Forum* (UDSF). Di antara ketujuh partai politik tersebut, partai SPLM merupakan partai yang paling berpengaruh di Sudan Selatan. Partai ini juga memiliki porsi terbanyak di kursi Majelis Legislatif Sudan Selatan dengan jumlah 70%. Posisi kedua diduduki oleh partai NCP dengan jumlah 15% dan untuk partai politik lainnya mendapat 15%. Jumlah tersebut sebagaimana telah ditentukan di dalam konstitusi sementara Sudan Selatan yang termuat dalam perjanjian CPA. (Stanford University Libraries, 2009).

Sebelum resmi menjadi bagian dari badan politik Sudan Selatan, SPLM merupakan kelompok pemberontak perang sipil. Selama dekade perang sipil, SPLM berperan sebagai gerakan politik yang berperan mewakili pemberontak selatan dalam mempertahankan otoritas sipil di daerah selatan. Namun kemudian penandatanganan CPA 2005 dan pembentukan *Government of South Sudan* (GoSS) menuntut SPLM beralih fungsi dan mengalami perubahan dari gesekan pemberontak ke partai politik yang harus bersaing dengan partai-partai lainnya untuk mendapatkan perhatian dan dukungan dari masyarakat. Dalam melakukan perubahan tersebut, SPLM memiliki tantangan yaitu mereka harus mengubah struktur dasar gerilya

hierarki dan bergerak menuju organisasi sipil dan demokartis. Pada Febuari 2006, SPLM resmi menjadi salah satu partai politik di Sudan Selatan. Kemudian pada Febuari 2007 pertemuan kepemimpinan SPLM diadakan untuk mengadopsi tentang isu-isu politik dan kebijakan serta komitmen SPLM dalam mempertahankan persatuan Sudan Selatan. Dan pada thun 2009 SPLM terlibat dalam pemilu untuk pertama kalinya sebagai partai politik. (Rolandsen, 2007).

Partai SPLM dan Partai NCP merupakan partai oposisi. Oleh karena itu, kedua partai tersebut memiliki porsi yang sedikit istimewa di Majelis Legislatif Sudan Selatan. Majelis Legislatif Sudan Selatan sendiri merupakan representasi dari rakyat Sudan Selatan yang menjalankan fungsi sebagai badan legislatif yang bertanggung jawab atas membuat dan memberlakukan undang-undang, mengawasi badan eksekutif, serta mempromosikan sistem pemerintahan Sudan Selatan. Kekuasaan yang diberikan kepada Majelis Legislatif Sudan Selatan yaitu tentang diskusi mengenai semua pertanyaan yang dibuat oleh presiden, mendakwa presiden dan wakil presiden. Selain itu, Majelis Legislatif Sudan Selatan juga memiliki hak atas menyetujui anggaran tahunan, rencana, program, dan kebijakan nasional Sudan Selatan. Dengan demikian, mayoritas suara yang dimiliki partai SPLM dalam kursi Majelis Legislatif Sudan Selatan menjadi sangat berpengaruh karena merupakan representasi suara rakyat. Perlu untuk diingat juga sesuai dengan perjanjian CPA 2005 bahwa SPLM sebagai pengendali pemerintah Sudan Selatan dan setiap negara bagiannya. Dengan demikian, partai SPLM memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam dunia perpolitikan Sudan Selatan (Stanford University Libraries, 2009).

C. Kebijakan Luar Negeri Sudan Selatan

Prospek kebijakan luar negeri Sudan Selatan menunjukkan netralitas yang percaya diri. Dalam kondisi internasional saat ini, Sudan Selatan bersandar ke negara-negara penghasil listrik

terbesar di dunia seperti China dan Amerika Serikat. Selama proses pembangunan nasional, Sudan Selatan mungkin dianggap gagal dalam menciptakan kebijakan luar negeri yang ideal. Negara baru ini juga akan menghadapi pertentangan dan penolakan dalam meningkatkan kebijakan luar negeri di beberapa daerah. Sejak referendum kemerdekaan, kementerian luar negeri dan kerjasama internasional telah berusaha mengembangkan dokumen-dokumen kebijakan luar negeri yang patut untuk dipuji. Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Barnaba M. Bejamin akan membawa masyarakat Sudan Selatan ke negara yang lebih baik dalam ruang lingkup regional maupun internasional. Kebijakan luar negeri Sudan Selatan memiliki fokus yaitu

- a. Toleransi nol (*zero tolerance*) terhadap negara-negara tetangga termasuk Republik Sudan. Di mana Sudan Selatan memiliki aturan yang ketat bagi negara tetangga yang mengganggu dan mengancam kedaulatan negara;
- b. Menjadi orang Afrika yang bangga untuk mendukung dan mempromosikan persatuan, solidaritas, dan kerja sama di Afrika;
- c. Membangun keseimbangan dalam menjalin hubungan bilateral dengan China dan Amerika Serikat. (Obongo, 2013).

Kebijakan luar negeri Sudan Selatan akan menjadi mekanisme dalam melaksanakan pembangunan dan mencapai tujuan nasional. Di era global, Sudan Selatan harus mengejar kebijakan luar negeri yang bebas dan tidak terkendali oleh negara lain. Dengan alasan tersebut, Sudan Selatan memberanikan diri untuk membangun kerja sama dengan negara manapun yang mungkin tertarik untuk membantu negara ini dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dengan menerapkan prinsip timbal balik yang saling menguntungkan serta tidak ada campur tangan dalam urusan kedaulatan negara menjadi pedoman dasar Sudan Selatan dalam bermitra. Pembangunan ekonomi dan sosial menjadi

prioritas sekaligus tantangan bagi negara baru tersebut. Dengan demikian, kebijakan luar negeri yang dibentuk harus mencerminkan jati diri Sudan Selatan yang imperatif (Obongo, 2013).

Sebagai negara baru, Sudan Selatan membutuhkan bantuan ekonomi dari komunitas internasional maupun regional untuk mengatasi masalah pembangunan setelah kemerdekaan. Seperti yang sudah diatur dalam kebijakan luar negerinya, Sudan Selatan mengedepankan keramahan dalam berkerja sama. Konfrontasi militer tidak diperlukan kecuali sebagai bentuk pertahanan diri Sudan Selatan dari ancaman musuh. Harapan besar Sudan Selatan kedepannya yaitu bisa menjalin kerja sama dengan negara-negara di seluruh dunia serta bergabung ke organisasi internasional.

D. Keadaan Ekonomi Sudan Selatan

Pasca bergabung dalam keanggotaan World Bank Group, keadaan ekonomi Sudan Selatan mengalami peningkatan. Ketika bergabung dengan World Bank Group, maka secara otomatis Sudan Selatan menjadi anggota dari masing-masing lembaga di bawah naungannya yaitu IBRD, IDA, MIGA, IFC, dan ICSID. Bergabungnya Sudan Selatan dengan World Bank Group didasari atas kebutuhan negara ini yang semakin kritis. Mengingat setelah perang sipil, Sudan Selatan mengalami banyak kerugian terutama dalam bidang ekonomi. Sudan Selatan banyak kehilangan sumber daya alamnya, terutama minyak yang merupakan penyumbang anggaran negara terbesar. Di samping itu, banyak hutan yang ditebang untuk diambil kayunya dan dijadikan senjata perang oleh kelompok SPLA. Volume kayu diperkirakan akan terus berkurang, mengingat setelah Sudan Selatan merdeka akan terjadi eksploitasi besar-besaran untuk perbaikan infrastruktur. Dampak perang saudara juga berakibat pada situasi kemanusiaan di Sudan Selatan. Pada tahun 2009, situasi kemanusiaan memburuk ditandai dengan adanya krisis pangan

dan wabah penyakit seperti diare, meningitis, kolera, dan polio (Sudan Humanitarian Overview, 2009). Selain itu, dipengaruhi juga oleh kinerja dan relevansi World Bank dalam membantu negara-negara di Benua Afrika.

Dengan menjadi anggota dari World Bank Group, maka Sudan Selatan akan memiliki akses untuk melakukan pinjaman dana. Terlebih lagi IDA menawarkan pembiayaan tanpa bunga untuk negara-negara termiskin. Dengan kata lain, IDA memiliki tujuan untuk membantu negara-negara berkembang dalam mengurangi kemiskinan dengan memberikan pinjaman tanpa bunga dan hibah untuk program yang mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketidakesetaraan, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sudan Selatan juga akan memenuhi syarat untuk pinjaman, ekuitas, dan bantuan teknis sebagai anggota dari IFC yang bekerja dan memiliki fokus di negara-negara berkembang untuk merangsang investasi dan pertumbuhan sektor swasta. Selain bantuan keuangan, Sudan Selatan juga akan mendapatkan akses ke berbagai layanan seperti analitis dan konsultasi dari World Bank Group. Sudan Selatan dapat memanfaatkan keahlian teknis dan pengetahuan World Bank di 20 sektor yang diinginkan. Sektor-sektor ini termasuk ke dalam sektor yang penting bagi pembangunan Sudan Selatan, seperti infrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya. (World Bank, 2015).

Tantangan yang dihadapi rakyat Sudan Selatan sangat besar, karena mereka termasuk ke dalam masyarakat termiskin di dunia. Setengah dari populasi penduduk Sudan Selatan hidup dengan pendapatan kurang dari 1 USD per hari. Lebih dari 90% wanita yang hidup di sana mengalami buta huruf dan kurang dari 2% anak yang mampu menyelesaikan pendidikan sekolah dasar. Tiga perempat dari populasi penduduk kurang mendapatkan perawatan kesehatan yang baik. Hal ini menandakan adanya kebutuhan mendesak dalam segi pendidikan, kesehatan, dan akses air bersih. Dekade konflik

yang panjang menjadi penyebab terhambatnya investasi infrastruktur yang signifikan di Sudan Selatan.

Pinjaman investasi Sudan Selatan selama 10 tahun terakhir secara keseluruhan terhitung sangat besar. Pinjaman tersebut tercatat senilai 538 juta USD dari World Bank dalam kontribusi donor melalui *Multi-Donor Trust Fund* (MDTF), 75 juta USD dari *South Sudan Transition Trust Fund* dan 294,0 juta USD dalam komitmennys dengan IDA. Laporan tahunan World Bank mencatat beberapa hasil bantuan yang sudah tercapai pada kurun waktu tahun 2012-2015. Dalam hal pembangunan infrastruktur World Bank berhasil mengembangkan jalan pedesaan. Saat ini tercatat sekitar 4.300 penduduk Sudan Selatan yang tinggal di wilayah pedesaan sudah memperoleh akses jalan yang lebih baik yang terhubung ke semua wilayah lainnya. Adanya perbaikan jalan tersebut dapat mempersingkat waktu tempuh perjalanan, yang semula 3 menit kilometer berkurang menjadi 1,5 menit per kilometer. Selain itu didirikan juga 38 pusat produksi pertanian yang dapat dijangkau oleh semua wilayah. Dalam segi ketahanan pangan juga meningkat, dimana lebih dari 15.000 petani dibantu dalam mengadopsi teknologi untuk produksi pangan dan lebih dari 50.000 penduduk mendapat bantuan makanan tanpa syarat (World Bank Report, 2017).

Keanggotaan Sudan Selatan dalam World Bank Group selama ini cukup membawa dampak positif. Menurut hasil laporan tahun 2018, portofolio World Bank di Sudan Selatan mencapai 233 juta USD, jumlah ini mencakup lima operasi nasional IDA di Sudan Selatan dengan saldo yang tidak dicairkan sebesar 36,59 juta USD atau 15,7% dari anggaran semula. Alokasi indikatif IDA di Sudan Selatan untuk tahun 2018 sebesar 243 juta USD, di mana 225 juta USD atau 92,5% dari dana tersebut dianggarkan untuk akhir tahun 2019 mendatang. Portofolio ini juga mendukung *Analytic and Advisory Services* (ASA) untuk mendapatkan data tentang konteks negara dan memastikan keputusan pemrograman

World Bank sesuai dengan tujuan (The World Bank, 2018). Prestasi utama Sudan Selatan sudah dimulai sejak tahun 2008 yang meliputi

1. Memastikan keamanan pangan dan nutrisi melalui inovasi

Sejak tahun 2009, World Bank telah menginvestasikan sebesar 79, 43 juta USD dalam dua proyek untuk menanggapi kebutuhan dan meningkatkan produksi pangan serta memulihkan mata pencaharian pertanian agar tetap stabil dalam menanggapi kedaruratan ketahanan pangan. Proyek yang pertama yaitu *The Emergency Food Crisis Response Project*, di mana proyek ini memperkenalkan teknologi benih baru yang memungkinkan dapat meningkatkan produktivitas lebih dari 229.000 petani. Selain itu, adopsi teknologi pasca panen telah membantu 125.211 petani untuk mengkonversi lebih dari 104.740 hektar lahan kosong menjadi lahan produktif. Yang kedua yaitu *Emergency Food and Nutrition Programme*, proyek ini dibentuk untuk memastikan ketahanan pangan dan nutrisi bagi lebih dari 210.000 warga Sudan Selatan yang paling rentan dan berada di daerah yang terkena dampak konflik dengan mendistribusikan 4.461 ton makanan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2017 silam, Sudan Selatan diprediksi akan mengalami bencana kekeringan dan kelaparan. Melalui pemberian bantuan makanan tambahan dan pengobatan untuk kekurangan gizi, proyek ini juga memastikan kebutuhan gizi lebih dari 43.000 anak dan 2.260 wanita hamil dan menyusui agar terpenuhi.

2. Memberikan perlindungan sosial

The Safety Net and Skills Development, proyek ini memberi lebih dari 85.000 orang miskin pelatihan untuk mengembangkan keterampilan demi meningkatkan ketahanan mereka terhadap guncangan ekonomi. Yang paling penting adalah keterlibatan publik dalam pekerjaan umum yang telah menyediakan *platform* untuk interaksi dan dialog sosial yang lebih besar, berkontribusi pada pembangunan perdamaian dan

stabilisasi tingkat lokal dengan menciptakan rasa persatuan di antara berbagai kelompok etnis.